

**POTRET PELAKSANAAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI
DESA TAMAN ASRI KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR**

(Skripsi)

Oleh

Adelia Putri Anggraini



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

ABSTRAK

POTRET PELAKSANAAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA TAMAN ASRI KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh

ADELIA PUTRI ANGGRAINI

Kemiskinan menjadi salah satu isu besar yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah melaksanakan upaya dalam mengatasi masalah kemiskinan yaitu salah satunya dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pemerintah memberikan bantuan pangan non tunai kepada rumah tangga yang memenuhi syarat dalam program Bantuan Pangan Non Tunai disetiap bulannya melalui mekanisme kartu elektronik atau akun elektronik. Dalam penyaluran bantuan BPNT diharapkan mewujudkan indikator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, tepat administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan indikator 6T Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Taman Asri. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara terstruktur dengan menyebar kuesioner, dan dokumentasi. Berdasarkan persepsi KPM dari keseluruhan indikator, masih terdapat beberapa indikator yang kurang berjalan dengan baik. Pada indikator tepat sasaran terdapat KPM BPNT yang berpendapatan lebih dari US\$2 atau Rp 31.000 perhari, sehingga dapat digolongkan keluarga mampu. Pada indikator tepat harga terdapat KPM BPNT yang berpendapat bahwasannya harga bahan-bahan pokok di e-warung tidak terdapat perbedaan harga dengan warung-warung lainnya, responden menyatakan bahwa harga bahan pokok di e-warung harganya sama saja tidak lebih murah ataupun tidak mahal. Selanjutnya pada indikator tepat waktu terdapat KPM BPNT yang terkadang menerima bantuan tidak sesuai dengan jadwal pencairan.

Kata Kunci : Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Indikator 6T, Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

ABSTRACT

A PORTRAIT OF THE IMPLEMENTATION OF NON-CASH FOOD ASSISTANCE (BPNT) IN TAMAN ASRI VILLAGE, PURBOLINGGO SUB-DISTRICT, EAST LAMPUNG DISTRICT

By

ADELIA PUTRI ANGGRAINI

Poverty is one of the big problems facing the Indonesian people. The Indonesian government has implemented efforts to overcome the problem of poverty, one of which is the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program. The government provides non-cash food assistance to households that meet the requirements of the Non-Cash Food Assistance program every month through an electronic card or electronic account mechanism. In distributing BPNT aid, it is hoped that the 6T indicators will be realized, namely right target, right quantity, right price, right time, right quality, right administration. This research aims to determine the implementation of indicators for the 6T Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Taman Asri Village. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques are observation, structured interviews by distributing questionnaires, and documentation. Based on KPM perceptions of all indicators, there are still several indicators that are not running well. In the right target indicator, there are BPNT KPM who earn more than US\$2 or Rp 31,000 per day, so they can be classified as well-off families. On the right price indicator there are BPNT KPM who argue that the price of staples in e-warong has no price difference with other stalls, respondents stated that the price of staples in e-warong is the same price, neither cheaper nor more expensive. Furthermore, in the timely indicator, there are BPNT KPM who sometimes receive assistance not in accordance with the disbursement schedule.

Keywords: Non-Cash Food Assistance (BPNT), 6T Indicator, Beneficiary Families (KPM)

**POTRET PELAKSANAAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI
DESA TAMAN ASRI KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR**

Oleh

Adelia Putri Anggraini

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

Judul Skripsi : **POTRET PELAKSANAAN BANTUAN PANGAN
NON TUNAI (BPNT) DI DESA TAMAN ASRI
KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR**

Nama Mahasiswa : *Adefia Putri Anggraini*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2011021017

Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E.,M.M
NIP 19807052006042002

2. **Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan**

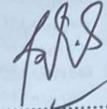
Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E.,M.M
NIP 19807052006042002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

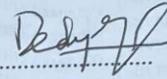
Ketua

: Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E., M.M



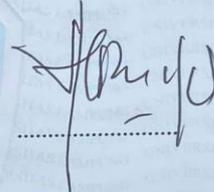
Penguji Utama

: Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si



Serketaris Penguji

: Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si
NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 04 Juli 2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka, saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai yang berlaku :

Bandar Lampung, 25 Juli 2024



Adelia Putri Anggraini

2011021017

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa Taman Asri, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur, pada tanggal 10 Januari 2002, anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Jumali dan Ibu Musiyam, pendidikan penulis dimulai dari TK PKK, Taman Asri (2007-2008), dan melanjutkan sekolah dasar di SD Negeri 3 Taman Asri (2008-2014), kemudian penulis melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Purbolinggo (2014-2017), melanjutkan sekolah menengah atas di SMAN 1 Purbolinggo (2017-2020), dan pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 di Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri).

Pada semester VI penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pahlungan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif pada organisasi Economic Business Entrepreneur Club (EBEC) sebagai staf bidang pengembangan manajemen dan praktik usaha mahasiswa.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Al-Baqarah : 286)

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerjakeras (untuk urusan yang lain).”

(Al-Insyirah : 6-7)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti engkau bisa ceritakan.”

(Boy Chandra)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Ku persembahkan karya ini sebagai rasa syukur kepada ALLAH SWT beserta Nabi junjungan kami Muhammad SAW, dan ucapan terimakasih serta rasa bangga kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Bapak Jumali dan Ibu Musiyam

Yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, kesabaran, keikhlasan, yang selalu menasehati, mendidik, dan mendoakanku dalam kondisi apapun, yang selalu memberiku semangat yang mendorongku dalam menyelesaikan skripsi ini, serta telah menjadi sosok orang tua yang selalu aku banggakan, yang selalu mendoakan keselamatan dan kesuksesanku.

Saudaraku Tersayang

Mahmudah dan Ahmad Robiki

Yang selalu membantu ketika dalam kesulitan, memberiku semangat, motivasi dan *support*, serta menghiburku ketika dalam kepenatan.

Serta

Untuk almamater tercinta

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'aalamin,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shlawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis skripsi yang berjudul **“Potret Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E, M.M., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan sekaligus dosen Pengganti Pembimbing skripsi penulis, terima kasih banyak Ibu atas segala saran, bimbingan, dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung.
3. Ibu Zulfa Emalia, S.E., M.Sc., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan, terima kasih banyak Ibu atas segala saran, bimbingan, dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung.
4. Ibu Ukhti Ciptawaty, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi penulis, terima kasih banyak Ibu atas segala saran, bimbingan, dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si., selaku dosen Penguji skripsi penulis, terima kasih banyak Bapak atas segala saran, bimbingan, dan

kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung.

6. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si., selaku dosen Penguji skripsi penulis, terima kasih banyak Bapak atas segala saran, bimbingan, dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung.
7. Bapak Thomas Andrian, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing Akademik.
8. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, dan para pendidik di Universitas Lampung pada umumnya yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
9. Staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu kelancaran proses penyelesaian skripsi ini, Ibu Mimi dan Pak Kasim.
10. Teruntuk kedua orangtua ku tersayang, Bapak Jumali dan pintu surgaku Ibu Musiyam. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan bangku kuliah, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Semoga bapak dan mamak sehat panjang umur dan bahagia selalu.
11. Teruntuk cinta kasih kedua kakak saya Mahmudah dan Ahmad Robiki, terima kasih banyak sudah menjadi penyemangat dari mulai awal kuliah sampai sekarang, terima kasih sudah banyak membantu dan mendo'akan.
12. Teruntuk keponakan tersayang Azril Rahandika Afabian, Reval Gio Harmawan dan Raqiya Tiyur Harmawan, terima kasih sudah menjadi penyemangat ketika lelah dan menjadi alasan untuk pulang ke rumah.
13. Teruntuk sahabat dekat ku Egi Destiani, Niken Ayudia, dan Yenni Anggrya, terima kasih banyak atas segala motivasi dan bantuan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Pembangunan.

14. Teman-teman Ekonomi Pembangunan angkatan 2020 yang telah berkontribusi dalam penulisan ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
15. Teman-teman sekamarku Alisa, Delia, Tantri yang selalu saling menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman KKN Desa Pahlungan, kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Afiliani, Arria, Adit, Defi, Farid, Intan.
17. Serta semua teman-teman dan berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala doa, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Bandar Lampung, 09 Februari 2024

Adelia Putri Anggraini

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Kajian Teori	11
2.1.1 Kemiskinan	11
2.1.2 Pengeluaran Pemerintah untuk <i>Transfer Payment</i>	18
2.1.3 Konsep Program BPNT	18
2.1.4 Tujuan Program BPNT	19
2.1.5 Manfaat Program BPNT	20
2.1.6 Prinsip Utama Program BPNT.....	20
2.1.7 Kriteria Penerima BPNT	21
2.1.8 Besaran Program BPNT.....	21
2.1.9 Acuan Indikator Penelitian	21
2.2 Kajian Pustaka	22
2.3 Kerangka Pemikiran.....	25
III. METODELOGI PENELITIAN	27
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian	27
3.2 Sumber Data.....	27
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	28
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian	28
3.5 Fokus Penelitian	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6.1 Observasi.....	34
3.6.2 Wawancara Terstruktur.....	34
3.6.3 Dokumentasi	35
3.7 Teknik Pengolahan Data	36
3.7.1 Editing.....	36
3.7.2 Coding.....	36

3.7.3 Tabulasi.....	36
3.8 Metode Analisis Data.....	37
3.8.1 Analisis Data.....	37
3.9 Instrumen Penelitian	37
3.9.1 Uji Validitas	37
3.9.2 Uji Reliabilitas	38
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Gambaran Umum Desa Taman Asri.....	40
4.2 Gambaran Umum Responden	42
4.3 Uji Validitas Data dan Reliabilitas	46
4.4 Hasil	47
4.5 Pembahasan.....	51
V. KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah KPM BPNT disetiap Dusun Desa Taman Asri Tahun 2023	8
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	30
Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Taman Asri	41
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk di Desa Taman Asri.....	41
Tabel 4.3 Jumlah Sekolah di Desa Taman Asti	42
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas.....	46
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas.....	47
Tabel 4.6 Indikator Tepat Sasaran	48
Tabel 4.7 Indikator Tepat Jumlah	48
Tabel 4.8 Indikator Tepat Harga	49
Tabel 4.9 Indikator Tepat Waktu	49
Tabel 4.10 Indikator Tepat Kualitas.....	50
Tabel 4.11 Indikator Tepat Administrasi	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Tahun 2020-2022..	3
Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Miskin di Desa dan Kota Provinsi Lampung Tahun 2018-2022	4
Gambar 1.3 Data Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017-2022	5
Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan	12
Gambar 2.2 Perangkap Kemiskinan.....	13
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran.....	26
Gambar 4.1 Rata-Rata Responden Menurut Jenis Kelamin.....	43
Gambar 4.1 Rata-Rata Responden Menurut Kelompok Usia	44
Gambar 4.1 Rata-Rata Responden Menurut Pendidikan Terakhir.....	45
Gambar 4.1 Rata-Rata Responden Menurut Pekerjaan	45

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini. Masalah kemiskinan tidak akan terselesaikan jika penyebabnya diabaikan. Kemiskinan tidak hanya menjadi topik yang menarik untuk dibahas secara nasional, namun juga menjadi masalah di tingkat daerah. Kemiskinan masyarakat, pada kenyataannya, semakin meluas di seluruh Indonesia (Perdana et al., 2023). Banyak negara, seperti Indonesia, terus berjuang melawan kemiskinan (Ratih et al., 2023). Salah satu isu terpenting yang dihadapi negara-negara berkembang adalah kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang, termasuk kebutuhan makanan dan bukan makanan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk yang berkaitan dengan uang dan konsumsi.

Masalah kemiskinan sangatlah lama dan dalam waktu yang cukup panjang, sama seperti halnya dengan usia manusia itu sendiri, dan unsur pokok permasalahannya yaitu menyangkut berbagai macam bentuk atau karakter kehidupan manusia. Dengan kata lain, kemiskinan adalah masalah global yang berdampak pada setiap negara. Meskipun dampak kemiskinan berbeda di setiap negara, kemiskinan merupakan masalah global yang besar (Hidayat Srihadi Hidayat, Afifuddin, 2021).

Menurut laporan “Kemiskinan dan Kemakmuran Bersama 2018” dari Bank Dunia, yang dirilis pada akhir tahun 2018, Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang paling parah di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Menurut Bank Dunia (2018), Nigeria, Kenya, Bangladesh, India, dan Indonesia memiliki tingkat kemiskinan terbesar. Dalam hal ketahanan pangan, Indonesia berada di peringkat

ke-65 di dunia menurut *The Economist Intelligence Unit* (2018), di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam (Ainistikmalia et al., 2022).

Menurut Kotze, masyarakat yang miskin masih bisa mendapatkan sumber daya melalui peluang yang ada. Meskipun bantuan dari luar terkadang diperlukan, namun bantuan tersebut tidak selalu tersedia, sehingga membuat orang bergantung padanya. Strategi pemberdayaan ini dinilai gagal karena agar suatu komunitas bisa berkembang, ia harus terlindung dari kelompok komunitas lain (Yulianto Kadji, 2004).

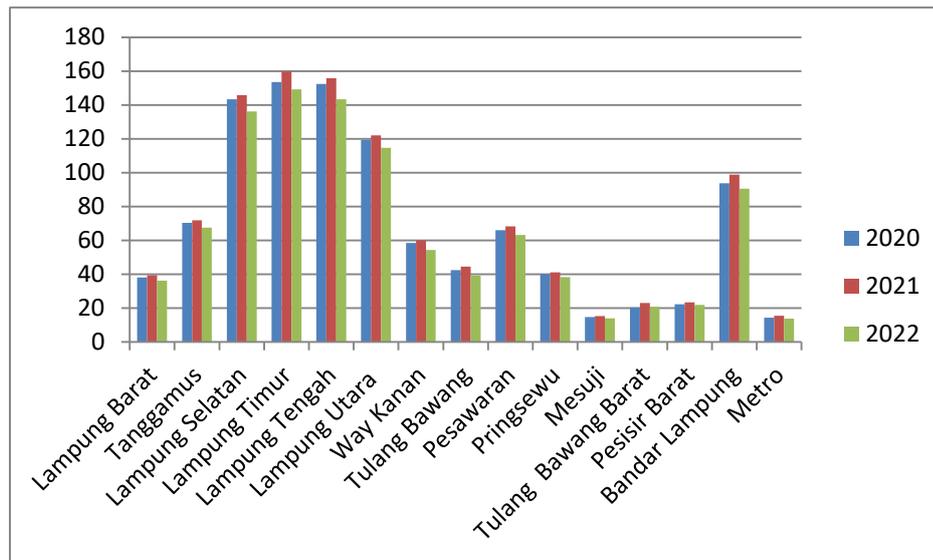
Supriatna (1997:90) lebih lanjut menyatakan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan khusus yang muncul secara tidak sengaja. Suatu populasi dianggap miskin jika menunjukkan tingkat gizi dan kesehatan, pendapatan, produktivitas tenaga kerja, pendidikan, dan kesejahteraan yang rendah. Hal ini menunjukkan adanya lingkaran setan ketidakberdayaan. Salah satu dampak dari kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan formal, yang mungkin disebabkan oleh kelangkaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal dan informal (Yulianto Kadji, 2004).

Kemiskinan, seperti yang didefinisikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara memadai. Pengangguran bukanlah satu-satunya faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan di negara-negara berkembang. Isu-isu lain termasuk kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah, ketidakberdayaan masyarakat, kapasitas lingkungan yang terbatas, dan standar hidup dan pendidikan yang rendah (Nurhasan et al., 2021).

UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, baik sebagai individu maupun Masyarakat. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah makanan. Salah satu landasan dari konsep kesejahteraan sosial adalah ketersediaan pangan. Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling

mendasar dan memiliki pengaruh besar bagi kehidupan setiap orang, menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Laurentcia & Yusran, 2021).

Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang masih memiliki masalah kemiskinan yang cukup besar dan harus segera diatasi.



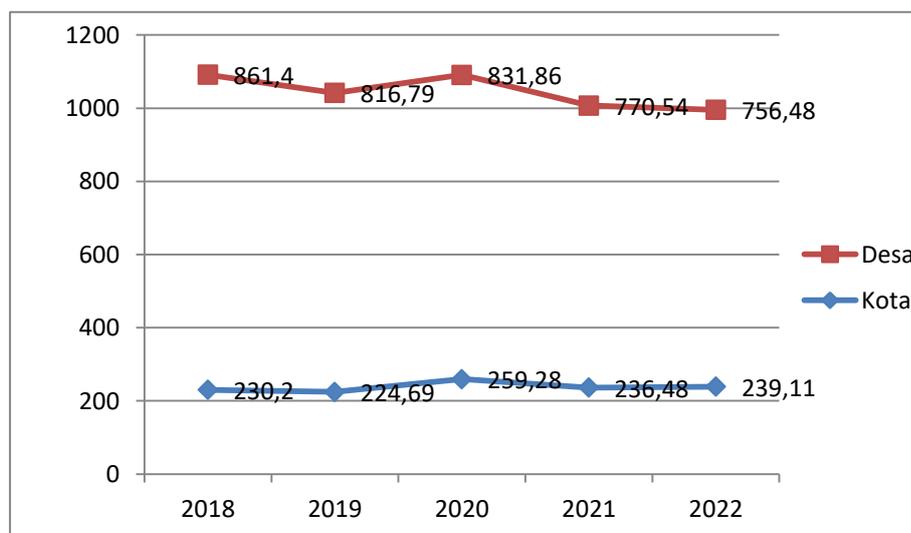
Sumber : BPS (diolah)

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Tahun 2020-2022

Dengan 159.790 orang yang dikategorikan sebagai orang miskin pada tahun 2021, Lampung Timur memiliki persentase penduduk miskin terbesar di antara semua kabupaten di Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Angka ini meningkat 6,2% dari tahun sebelumnya. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebesar 6.220 orang dari tahun sebelumnya. Meskipun jumlah penduduk miskin turun 10,67 ribu orang menjadi 149,12 ribu orang pada tahun 2022, Kabupaten Lampung Timur masih menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Lampung.

Kemiskinan dan ketimpangan memiliki keterkaitan yang erat karena adanya perbedaan kekayaan sumber daya alam dan demografi di berbagai tempat. Meskipun kesenjangan antara tingkat kemiskinan di daerah perkotaan dan perdesaan masih ada, tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung semakin menurun

(Yuliawan et al., 2022). Di seluruh dunia, ketimpangan merupakan masalah utama yang bahkan terjadi di negara-negara industri. Namun, tingkat masalah ini di negara-negara makmur relatif lebih kecil atau tidak terlalu terlihat dibandingkan dengan negara-negara terbelakang (Asy'ariati et al., 2022). Menurut data Badan Pusat Statistik per September 2022, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar dalam hal kemiskinan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Antara Maret dan September 2022, jumlah penduduk di wilayah perkotaan yang dianggap miskin bertambah 0,16 juta (dari 11,82 juta menjadi 11,98 juta). Pada saat yang sama, terdapat kenaikan 0,04 juta orang miskin yang tinggal di daerah pedesaan (dari 14,34 juta pada Maret 2022 menjadi 14,38 juta pada September 2022). Perbedaan rata-rata pengeluaran antara setiap individu miskin dan garis kemiskinan diukur dengan indeks kedalaman kemiskinan. Selisih antara pengeluaran rata-rata penduduk dan garis kemiskinan meningkat seiring dengan meningkatnya nilai indeks.

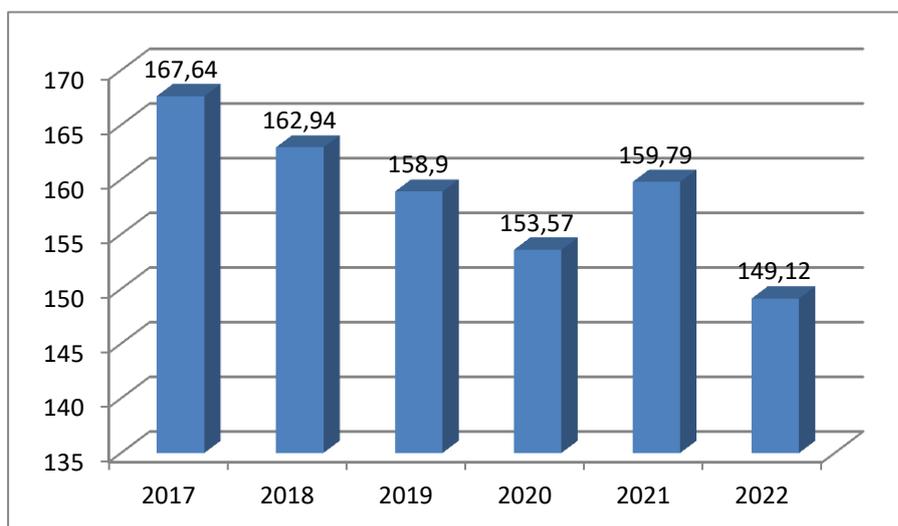


Sumber : BPS (diolah)

Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Di Desa dan Kota Provinsi Lampung Tahun 2018-2022

Berdasarkan analisis data kemiskinan di Provinsi Lampung, terdapat lebih banyak penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan. Di Provinsi Lampung, terdapat perbedaan yang mencolok dalam hal

persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan dan perkotaan. Seiring berjalannya waktu, ketimpangan ini terus berlanjut dan mempengaruhi sekitar 500.000 orang per tahun.



Sumber : BPS (diolah)

Gambar 1.3 Data Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017-2022

Grafik di atas menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Timur dari waktu ke waktu, kecuali pada tahun 2021 yang mengalami peningkatan sebesar 159,79 ribu jiwa dibandingkan tahun 2020. Meskipun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Timur berkurang 10,67 ribu jiwa pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, kabupaten ini masih memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Lampung.

Pengentasan masalah kemiskinan telah dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tujuan pertama yaitu mengakhiri kemiskinan dimanapun dan segala bentuk. SDGs ditujukan untuk segala bentuk kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem. Adapun pemerintah Indonesia menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi nihil pada tahun 2024 (TNP2K, 2021). Keadaan ini menunjukkan bahwa terdapat upaya percepatan dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem, sehingga diperlukan berbagai program

dan koordinasi antar pemerintah demi terwujudnya target tersebut (Akhmad Fatikhurizqi, 2020).

Upaya pemerintah untuk memerangi kemiskinan secara resmi dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 15/2010 untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Peraturan Presiden ini kemudian menjadi dasar pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Anggota tim ini dipilih dari kalangan perusahaan, pemerintah, dan masyarakat umum. Selain itu, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) juga dibentuk di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Dalam rangka mengurangi beban pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, pemerintah kini menjalankan berbagai program (Firdausi & Hertati, 2022). Karena makanan adalah kebutuhan dasar manusia, makanan merupakan pengeluaran yang penting dan esensial yang menghabiskan lebih dari 50% pendapatan (Rahma et al., 2023).

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan banyak inisiatif untuk memerangi kemiskinan. Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) adalah salah satu inisiatif tersebut. BPNT diberikan sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan yang lebih luas, yang juga mencakup perlindungan, jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dasar, dan rehabilitasi sosial. Selain itu, inisiatif BPNT diharapkan dapat mempercepat program inklusi keuangan dengan memfasilitasi akses yang lebih mudah ke layanan keuangan formal di bank. Bantuan sosial nontunai didistribusikan kepada masyarakat dengan cara yang dianggap lebih akurat, tepat waktu, dan efisien dibandingkan dengan pendekatan konvensional. Selain itu, sistem ini juga membutuhkan lebih sedikit administrasi dan lebih hemat biaya. Dengan menggunakan kartu elektronik, KPM dapat memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan gizi mereka untuk diet seimbang yang lebih baik dengan membeli kebutuhan pokok seperti beras, telur, dan barang-barang lainnya dengan harga yang berlaku. Selain itu, karena dana bantuan dapat dicairkan sesuai dengan kebutuhan KPM, penyaluran bantuan sosial nontunai dapat membantu masyarakat belajar menabung.

Bantuan pangan bulanan diberikan kepada rumah tangga penerima melalui Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang disponsori oleh pemerintah. Bantuan ini diberikan dalam bentuk kartu elektronik atau sistem akun elektronik terbatas yang dapat digunakan untuk membeli makanan di tempat-tempat tertentu yang telah bermitra dengan bank-bank pemerintah, seperti BTN, Bank BRI, dan lainnya. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memiliki dua tujuan utama yaitu menurunkan biaya pembelian pangan masyarakat dan menyediakan pangan yang tepat waktu, tepat sasaran, dan bergizi seimbang bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (Julianto, 2020).

Informasi lebih lanjut tentang topik ini dapat ditemukan di Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai. Bantuan sosial harus diterima sesuai jadwal, dalam jumlah yang tepat, harga yang tepat, kualitas yang tepat, dan dengan tujuan yang tepat agar dapat diarahkan secara efektif dan terarah. Oleh karena itu, untuk menjamin distribusi bantuan sosial yang efisien, penting untuk mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Program Bantuan Pangan Non-Tunai. Menurut Presiden Republik Indonesia, peraturan ini akan memudahkan penyaluran bantuan sosial secara efektif, sehingga dapat meningkatkan manfaat bagi para penerima manfaat dan mendorong inklusi keuangan. Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sebelumnya telah menggantikan program Beras Sejahtera (Rastra) yang bermasalah (Julianto, 2020).

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai diharapkan mewujudkan indikator 6T : 1.) Tepat sasaran: Tujuannya tercapai, 2.) Tepat jumlah: Jumlah bantuan pangan yang diberikan sesuai dengan jumlah yang seharusnya diberikan, 3.) Tepat harga: Biaya bantuan pangan yang diberikan sebanding dengan jumlah yang seharusnya diberikan, 4.) Tepat waktu: Distribusi bantuan pangan dilakukan pada waktu yang tepat untuk mencapai tujuan, 5.) Tepat kualitas: Tingkat bantuan pangan sesuai dengan tingkat kualitas yang diinginkan, dan 6.) Tepat administrasi: Tingkat bantuan yang diberikan BPNT kepada KPM yang memenuhi persyaratan dan membutuhkannya. Persyaratan KPM menentukan tingkat bantuan yang tepat,

memastikan bahwa jumlah yang diberikan memenuhi standar yang ditetapkan. Agar penerima bantuan dapat memperoleh keuntungan finansial, diperlukan penetapan harga yang tepat. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa bantuan pangan yang diberikan dihargai sesuai dengan nilai pasar dan strategi penetapan harga yang berlaku. Tepat waktu memastikan KPM mendapatkan bantuan secara tepat waktu dengan memantau ketersediaan dan penyaluran bantuan BPNT sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Tepat kualitas menjamin bahwa KPM menerima bantuan BPNT yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, terutama dalam hal jenis dan kualitas bahan pangan. Ketepatan dan kelengkapan administrasi dan dokumentasi program BPNT, termasuk pendataan dan prosedur administrasi lainnya, disebut sebagai ketepatan administrasi. Keberhasilan program BPNT secara langsung akan dipengaruhi oleh keseluruhan indikator tersebut (Rupiarsieh & Musta'ana, 2023).

Dalam penelitian yang ditulis oleh Chairil Anwar, dkk (2023) pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap tingkat kemiskinan yaitu berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, artinya apabila Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengalami kenaikan maka tingkat kemiskinan akan naik tetapi tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan secara signifikan. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh Khotim Fadhli dan Laila Rohmatun Nazila (2023) pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan yaitu menunjukkan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memiliki pengaruh negative signifikan.

Salah satu desa yang menerima manfaat dari inisiatif BPNT adalah Desa Taman Asri, yang terletak di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Program BPNT diterima oleh 359 keluarga, atau 31% dari total masyarakat. Di Desa Taman Asri, Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) telah berjalan sejak tahun 2019. Tujuan dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah untuk membantu mereka yang miskin atau terancam miskin. Namun, program ini tidak berlaku untuk anggota ASN, pegawai pemerintah, TNI, atau Polri. Jumlah warga yang menerima bantuan BPNT menurut masing-masing dusun di Desa Taman Asri adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah KPM BPNT Disetiap Dusun Desa Taman Asri Tahun 2023

Dusun	Jumlah KPM BPNT
Dusun 1	108
Dusun 2	79
Dusun 3	86
Dusun 4	86
Jumlah	359

Sumber : Kepala Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Di Desa Taman Asri, bantuan pangan non-tunai (BPNT) mulai diimplementasikan pada tahun 2019. Tahun ini merupakan tahun kelima pelaksanaan BPNT. Selama lima tahun terakhir, Desa Taman Asri di Kecamatan Purbolinggo selalu menjadi desa dengan jumlah penerima BPNT terbanyak. Sekitar 359 rumah tangga dari 1.161 total populasi telah menerima bantuan pemerintah, yaitu BPNT. Pra-penelitian dan wawancara dengan Kepala Desa Taman Asri mengindikasikan bahwa penyaluran BPNT masih belum berjalan sebagaimana mestinya.

Kinerja program BPNT dievaluasi dengan menggunakan indikator 6T yaitu : tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi-diharapkan dapat membantu memastikan bahwa program ini diimplementasikan secara efektif, sehingga dapat membantu mengurangi angka kemiskinan. Namun, data menunjukkan bahwa program ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Sebagai contoh, program BPNT tidak ditargetkan seefektif mungkin, dan bantuan yang tadinya diberikan dalam bentuk makanan pokok kini telah diganti dengan uang tunai. Hal ini memberikan keleluasaan bagi KPM untuk menggunakan uang bantuan tersebut, sehingga mereka dapat membeli produk atau jasa lainnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program BPNT memenuhi kebutuhan dasar KPM. Selain itu, inisiatif BPNT yang telah berjalan selama kurang lebih lima tahun ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja, mengurangi beban keuangan tenaga kerja KPM, dan membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Namun, jika dibandingkan dengan desa-desa tetangga di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Desa Taman Asri masih menjadi desa dengan jumlah penerima BPNT terbanyak.

Hal ini mendorong ketertarikan peneliti dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai potret pelaksanaan program BPNT. Atas dasar permasalahan yang telah diuraikan tersebut, bahwasannya program BPNT merupakan salah satu program bantuan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sebuah penelitian berjudul **“Potret Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur”** dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan program BPNT.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana potret pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Taman Asri?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Taman Asri.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah desa Taman Asri sebagai gambaran tentang potret Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Taman Asri.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

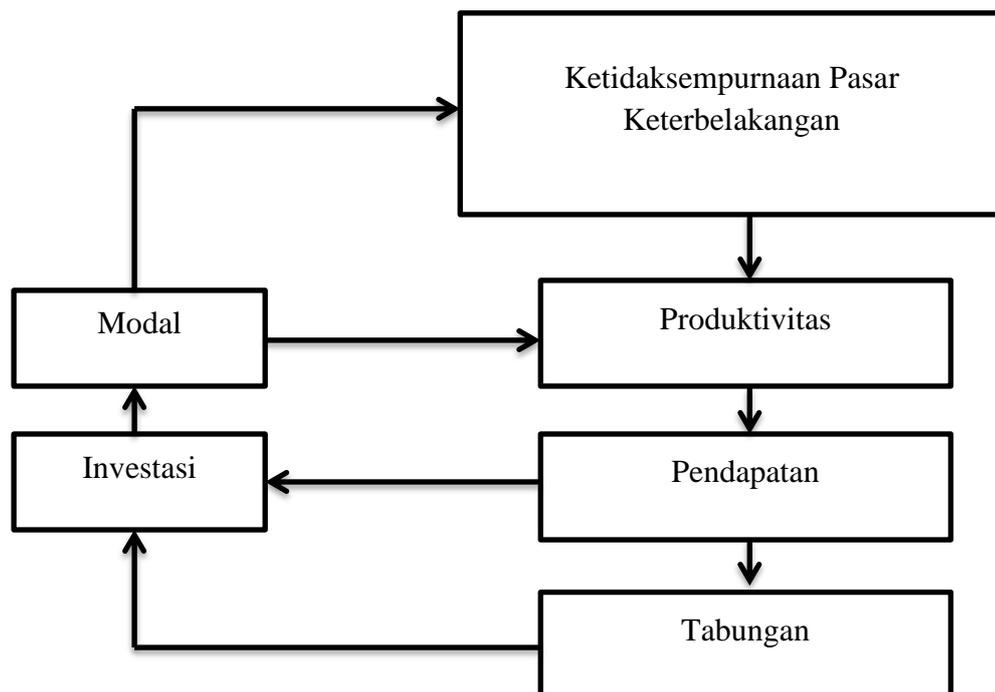
2.1.1 Kemiskinan

Berada dalam kemiskinan adalah situasi yang tidak disengaja yang disebabkan oleh keadaan yang tidak dapat dikendalikan. Seseorang dapat diklasifikasikan sebagai orang miskin jika mereka memenuhi kriteria tertentu, seperti berpendidikan rendah, tidak produktif dalam bekerja, berpenghasilan rendah, memiliki gizi dan kesehatan yang buruk, dan memiliki kesejahteraan yang rendah. Hal ini menyinggung lingkaran setan yang tak berujung. Kurangnya sumber daya manusia, yang mungkin berasal dari keterbatasan akses terhadap pendidikan formal dan informal, dapat menjadi akar penyebab kemiskinan. Akibatnya, mungkin hanya ada sedikit pendidikan informal (Yulianto Kadji, 2004).

Sejumlah masalah yang saling berkaitan yang memperburuk siklus kemiskinan, terutama di negara-negara berkembang, membatasi kemampuan suatu negara untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Masalah masyarakat kurang mampu yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan di dalam negara mereka sendiri telah dijelaskan oleh Nurkse (1961). Rendahnya tingkat pendapatan riil merupakan akibat langsung dari rendahnya produktivitas, rendahnya kapasitas modal untuk berinvestasi, rendahnya kemampuan menabung, dan rendahnya tingkat pendapatan riil. Sulit bagi masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan karena lingkaran setan ini (Muhammad Nurjihadi, 2016).

Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Cycle of Poverty*) oleh Ragnar Nurkse (1953) mengungkapkan bahwa kemiskinan yang tidak mempunyai ujung dan pangkalnya dimana semua unsur yang mengakibatkan kemiskinan akan saling berhubungan. Lingkaran setan kemiskinan oleh Ragnar Nurkse (1953) bahwa

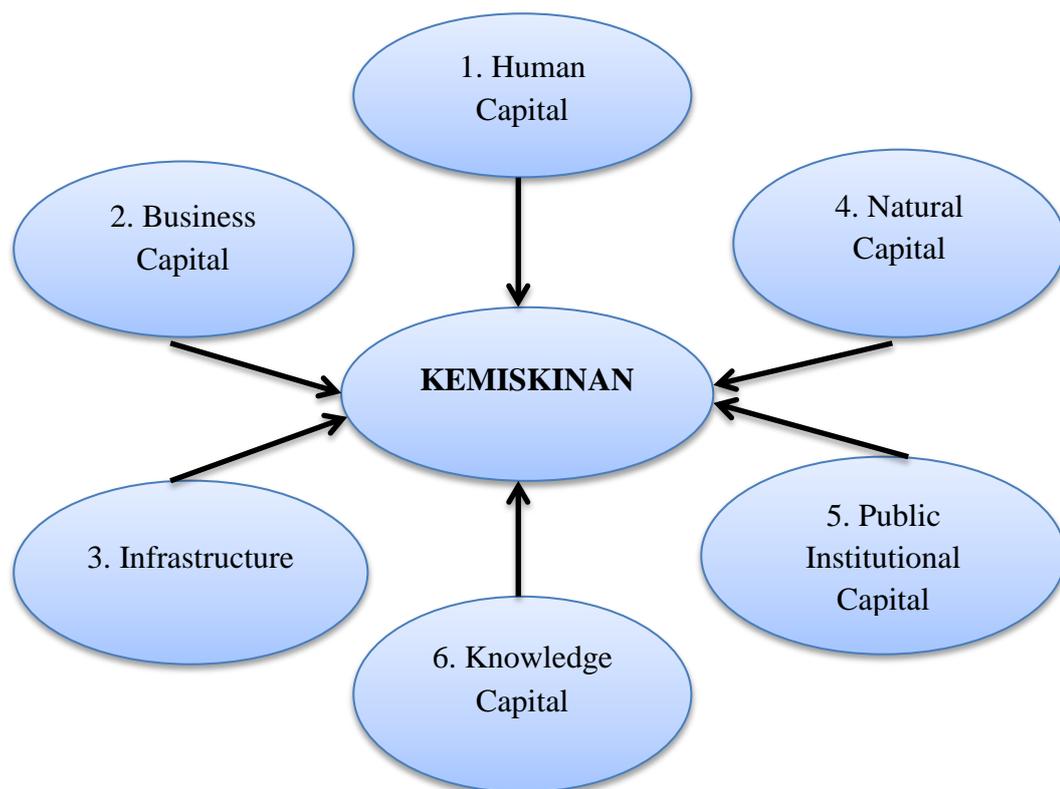
kemiskinan (ketidaksejahteraan) dan ketidaksempurnaan pasar berdampak pada rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas berdampak pada pendapatan masyarakat yang menurun sehingga bagian untuk tabungan dan investasi juga berkurang. Berkurangnya investasi berdampak pada rendahnya modal. Rendahnya modal akan berdampak pada ketidaksempurnaan pasar dan terjadinya keterbelakangan. Hal ini terus bergerak melingkar sehingga tidak mempunyai ujung dan pangkal, sehingga menyebabkan masyarakat miskin sulit keluar dari kemiskinannya.



Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan (Ragnar Nurkse, 1953)

Selanjutnya, Sachs menyatakan bahwa perangkap kemiskinan sebagai kondisi ekstrim yang menimbulkan masyarakat miskin tidak mempunyai kemampuan untuk membawa dirinya keluar dari kemiskinan yang dialami. Masyarakat dapat terperangkap kemiskinan ekstrim dikarenakan mereka hidup tanpa modal minimum yang diperlukan sebagai pegangan hidup. Modal-modal yang dimaksud Sachs yaitu : 1. *Human capital*, modal sebagai manusia diantaranya kesehatan diri, gizi, keterampilan yang harus ada pada masing-masing individu supaya menjadi lebih produktif. 2. *Bussines capital*, modal bisnis yang diharapkan yaitu berbagai fasilitas serta alat transportasi yang dibutuhkan untuk kegiatan pertanian

dan industry serta jasa pelayanan lainnya. 3. *Infrastructure*, infrastruktur dasar yang dibutuhkan seperti jalan, listrik, air dan sanitasi, bandara dan pelabuhan laut, system telekomunikasi merupakan pendukung utama dalam produktivitas bisnis. 4. *Natural capital*, modal alam seperti tanah yang subur untuk ditanami, tersedianya keanekaragaman hayati, berfungsinya ekosistem yang baik merupakan kebutuhan bagi pelayanan lingkungan yang mendukung kehidupan masyarakat. 5. *Public institutional capital*, modal institusi public dapat berbentuk hukum dan aturan, system perdagangan, system peradilan, institusi pemerintah serta kebijakan pelayanan dan pembagian kerja yang baik, diperlukan masyarakat untuk menjadi lebih produktif. 6. *Knowledge capital*, modal pengetahuan manusia yang dapat membuat manusia berhasil dan produktif mengembangkan sumber-sumber alam yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi (Renwarin, 2016). Ketiadaan modal tersebut dapat digambarkan sebaga berikut :



Sumber : Jeffry D. Sachs (2005)

Gambar 2.2 Perangkap Kemiskinan J.D. Sachs (2005)

a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan kualitas yang memadai, keterbatasan akses terhadap layanan perumahan, kesehatan, pendidikan, dan sanitasi di bawah standar, keterbatasan kontrol terhadap kepemilikan atau penggunaan lahan, degradasi sumber daya alam dan kondisi lingkungan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta beban populasi yang tinggi akibat jumlah anggota keluarga yang besar (Triani et al., 2020).

Menurut BPS, kemiskinan dicirikan sebagai suatu kondisi kekurangan yang menghalangi seseorang atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kemiskinan juga dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi kekurangan materi yang disebabkan oleh kurangnya akses masyarakat terhadap sumber daya, aset produktif, dan pendapatan. Yang pada dasarnya kemiskinan merupakan kekurangan sumberdaya, asset produktif dan pendapatan yang layak menyebabkan kondisi kekuarangan pada individu atau rumah tangga (Yoserizal, 2015). BPS menggunakan 14 kriteria untuk mengidentifikasi apakah sebuah rumah atau keluarga termasuk dalam kategori miskin. Standar-standar ini adalah sebagai berikut :

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
- b. Lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari kayu, bambu, atau tanah yang tidak mahal.
- c. Dinding rumah terbuat dari bambu, kayu jelek, atau tembok yang tidak diplester.
- d. Tidak mempunyai fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e. Sumur terbuka, mata air, sungai, atau air hujan menjadi sumber air minum.
- f. Minyak tanah, arang, dan/atau kayu bakar adalah bahan bakar yang digunakan untuk memasak sehari-hari.
- g. Hanya mengonsumsi daging, susu, dan ayam seminggu sekali.
- h. Hanya membeli satu pasang pakaian baru dalam setahun.
- i. Hanya mampu makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.

- j. Individu yang tidak mampu membayar perawatan medis di poliklinik atau puskesmas.
- k. Kepala keluarga memperoleh penghasilan dari berbagai sumber, termasuk bertani dengan lahan seluas 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan profesi lain yang berpenghasilan kurang dari Rp 600.000,00 per bulan.
- l. Kepala rumah tangga berpendidikan paling tinggi: tidak bersekolah, hanya tamat SD, atau tidak tamat SD.
- m. Umumnya tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah diperjualbelikan yang bernilai minimal Rp 500.000. Hal ini mencakup emas, perak, dan barang modal lainnya, serta sepeda motor yang dipinjamkan atau tidak.

Sebuah rumah tangga dianggap miskin jika memenuhi minimal sembilan kriteria. Menurut Bank Dunia, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya karena kesulitan ekonomi. Pendekatan yang digunakan oleh Bank Dunia untuk menentukan pendapatan masyarakat miskin didasarkan pada gagasan bahwa pendapatan harian mereka tidak melebihi US\$2 (Ramadhan, 2023).

b. Jenis-jenis Kemiskinan

Pola kemiskinan ada empat (Stella Kakisina, 2021) yaitu :

- a. *Persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun.
- b. *Cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan.
- c. *Seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan.
- d. *Accidental poverty*, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Klasifikasi kemiskinan ada lima kelas (Annur, 2013) yaitu :

- a. Kemiskinan absolut adalah ketika pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan, dan berada di bawah garis kemiskinan.

- b. Kemiskinan relative, terlepas dari apakah seseorang dianggap miskin secara absolut atau tidak, kemiskinan relatif dicirikan sebagai suatu kondisi di mana pendapatan mereka lebih rendah daripada kelompok lain.
- c. Kemiskinan structural, Sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh sebab-sebab budaya yang ragu-ragu untuk berusaha menaikkan taraf hidup dengan bantuan pihak luar.
- d. Kemiskinan kronis, kemiskinan kronis memiliki banyak penyebab yang kompleks, seperti rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, kekurangan sumber daya dan isolasi (terutama di tempat-tempat dengan sumber daya alam yang sedikit), sikap dan gaya hidup yang tidak produktif, kurangnya kesempatan kerja, dan ketidakmampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan ekonomi pasar.
- e. Kemiskinan sementara, variasi musim, bencana alam, pergeseran siklus ekonomi dari normal ke krisis, dan kejadian-kejadian lain yang mengakibatkan turunnya taraf hidup masyarakat .

c. Penyebab Kemiskinan

Sharp et al. menemukan penyebab ekonomi dari kemiskinan dalam studi mereka. Pertama, Ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan diakibatkan oleh akses yang tidak merata terhadap sumber daya, yang pada gilirannya menyebabkan kemiskinan. Kedua, manajemen sumber daya manusia yang buruk dapat menjadi penyebab kemiskinan. Salah satu dampak langsung dari sumber daya manusia yang berkualitas rendah adalah rendahnya kompensasi, yang juga menyebabkan rendahnya produktivitas. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia, seperti kesulitan hidup, diskriminasi, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya pendidikan. Ketiga, kesenjangan dalam akses keuangan dapat melahirkan kemiskinan (Yulianto Kadji, 2004).

Penyebab kemiskinan selanjutnya yaitu pendidikan yang ditempuh rendah, kurangnya motivasi bekerja, keterbatasan modal, tanggung jawab keluarga, dan pendapatan rendah. Orang dengan tingkat pendidikan rendah tidak dapat memperoleh keterampilan hidup yang diperlukan. Kemampuan seseorang untuk memasuki dunia kerja dibatasi oleh bakat dan tingkat pendidikannya. Orang yang memiliki sikap malas tidak bergairah dengan pekerjaan mereka dan tidak terlibat

di dalamnya. Ketika sumber daya alam suatu masyarakat tidak lagi memadai untuk mendukung gaya hidupnya, kemiskinan dapat terjadi. Meskipun akan sangat baik jika seseorang dapat memulai bisnis mereka sendiri, orang miskin tidak mungkin dapat melakukannya karena mereka tidak memiliki sumber daya dan keahlian yang diperlukan. Kemiskinan diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang untuk menghidupi keluarganya, terutama jika mereka memiliki banyak tanggungan dan tidak mampu menghasilkan lebih banyak uang. Kewajiban dan harapan hidup yang harus dipenuhi pada akhirnya akan menjadi terlalu berat untuk ditangani (Annur, 2013).

d. Program Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah mengambil pendekatan multidimensi terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk langkah-langkah seperti pemberdayaan usaha mikro dan kecil, bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Program-program ini, yang bekerja sama dengan perusahaan lokal, pemerintah, dan masyarakat, dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kegiatan ekonomi masyarakat yang kurang mampu (Perpres RI No 166 Tahun 2014, 2014).

Untuk meningkatkan koordinasi langkah-langkah penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menerapkan Peraturan Presiden No. 15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan ini merupakan versi yang lebih baik dari Peraturan Presiden No. 13/2009, yang mengatur koordinasi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden tersebut, pemerintah pusat harus membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang beranggotakan wakil-wakil dari lembaga pemerintah, perusahaan swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) juga telah dibentuk secara bersamaan (Kominfo, 2011). Alat-alat berikut ini digunakan dalam upaya menurunkan kemiskinan:

- a. Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, yang berada di Klaster I, bertujuan untuk meningkatkan akses keluarga berpenghasilan rendah terhadap air bersih, sanitasi, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Program-program Klaster I

meliputi Program Beras untuk Keluarga Berpendapatan Rendah, Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, Program Keluarga Harapan, Program Bantuan Operasional Sekolah, dan Program Bantuan Siswa Miskin.

- b. Tujuan Klaster II adalah untuk mengurangi kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat. Berdasarkan gagasan pemerataan dan keadilan sosial, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menerapkan kebijakan yang memungkinkan kelompok-kelompok yang terpinggirkan untuk sepenuhnya terlibat dalam proses pembangunan. Program-program untuk pemberdayaan masyarakat nasional, pertumbuhan, dan pengembangan lapangan kerja termasuk dalam Klaster II.
- c. Klaster III difokuskan pada pemberdayaan usaha mikro dan kecil untuk memerangi kemiskinan. Mendorong pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan dukungan keuangan adalah tujuannya. Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Usaha Bersama merupakan bagian dari Klaster III. Klaster III terdiri dari Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Usaha Bersama.

2.1.2 Pengeluaran Pemerintah untuk *Transfer Payment*

Menurut Sukirno (2005), pengeluaran pemerintah adalah komponen penting dari kebijakan fiskal yang digunakan untuk mendanai pengadaan barang dan jasa dalam rangka mendukung pelayanan publik dan mendorong pengembangan sumber daya manusia. Untuk proses pembangunan, pemerintah telah memisahkan tugas fiskal ke berbagai bidang. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2006 mencantumkan bidang-bidang berikut yang diklasifikasikan sebagai belanja pemerintah : pelayanan umum; kesejahteraan dan ketentraman; ekonomi; lingkungan hidup; perumahan dan fasilitas umum; kesehatan; pariwisata dan budaya; pendidikan; dan perlindungan sosial (Primananda et al., 2023).

2.1.3 Konsep Program BPNT

Bantuan pangan non-tunai (BPNT) adalah salah satu jenis bantuan sosial pangan yang diberikan pemerintah kepada rumah tangga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya. Hanya pembelian bahan pangan yang dilakukan di e-warung yang telah

bermitra dengan bank yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan non-tunai ini, yang dikenal sebagai BPNT. Bantuan ini disalurkan melalui sistem akun elektronik. Program BPNT diluncurkan pada tahun 2017 dengan tujuan sebagai proyek percontohan. Bergantung pada keberhasilan program, ada kemungkinan untuk memperluasnya di tahun berikutnya. Inisiatif ini merupakan upaya untuk mengubah kebijakan negara dari pemberian bantuan pangan non-tunai (BPNT) menjadi pola subsidi (Rastra) (Rachman et al., 2018).

Hanya 44 kota yang dipilih untuk mendapatkan bantuan pangan nontunai pada tahun 2017 berdasarkan aksesibilitas dan infrastruktur yang memadai. Di kota-kota lainnya, sistem Rastra masih beroperasi. Program BPNT pemerintah Indonesia bertujuan untuk mempermudah pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Hal ini ditunjukkan oleh Program BPNT, yang membantu KPM mencapai SDGs sekaligus memberikan nutrisi yang lebih seimbang, penargetan dan waktu yang lebih baik untuk bantuan pangan nontunai, peningkatan pilihan dan kontrol atas bagaimana KPM memenuhi kebutuhan pangan mereka, dan masih banyak lagi. Mengurangi beban keuangan KPM adalah tujuan dari Program BPNT (Rachman et al., 2018).

Dalam penyaluran BPNT diharapkan mewujudkan prinsip 6T, prinsip 6T yang dimaksud adalah tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dinilai dengan memperhatikan sejauh mana indikator 6T terpenuhi, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memerlukan mekanisme pelaksanaan yang diatur dengan baik agar dapat berhasil (Rupiarsieh & Musta'ana, 2023).

2.1.4 Tujuan Program BPNT

Berikut ini adalah tujuan dari program BPNT :

- a. Meringankan beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
- b. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM.

- c. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM.
- d. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- e. Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

2.1.5 Manfaat Program BPNT

Manfaat dari program BPNT yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- b. Program ini meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial.
- c. Sesuai dengan agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNBT), program ini mendorong transaksi non tunai.
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil yang sudah berpengalaman dalam usaha penjualan telur dan beras.

2.1.6 Prinsip Utama Program BPNT

Prinsip utama dari program BPNT yaitu sebagai berikut :

- a. Diakses dan dimanfaatkan oleh KPM dengan mudah.
- b. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM atas jenis, kuantitas, harga, dan kualitas bahan makanan (seperti beras dan/atau telur), serta tempat membelinya berdasarkan preferensi pribadi (bukan e-warung tertentu dan bahan pangan tidak dipaketkan).
- c. Mempromosikan usaha eceran rakyat untuk melayani KPM guna menarik klien dan meningkatkan pendapatan.
- d. Memberikan akses kepada pelaku usaha eceran dan KPM terhadap layanan keuangan.
- e. Untuk memberikan alternatif ruang persediaan yang lebih optimal, E-warung dapat membeli persediaan makanan dari berbagai sumber.
- f. Bank penyalur bertanggung jawab mengalokasikan dana bantuan ke rekening KPM, tidak bertanggung jawab memesan atau menyediakan makanan kepada KPM.

2.1.7 Kriteria Penerima BPNT

Di daerah pelaksana, 25% kondisi sosial ekonomi terendah disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT, yang terdiri dari rumah-rumah di wilayah pelaksana BPNT yang keadaan sosial ekonominya termasuk dalam 25% kondisi sosial ekonomi terendah, disusun oleh Kementerian Sosial. Rumah-rumah ini adalah target sasaran BPNT. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah disetujui dan dikukuhkan oleh pemerintah daerah menjadi sumber daftar KPM BPNT (PMK, 2019).

2.1.8 Besaran Program BPNT

BPNT merupakan bantuan sosial pangan yang pada awal diresmikannya BPNT dana yang diberikan kepada masyarakat penerima BPNT yaitu senilai Rp 110.000, kemudian pada awal tahun 2020 dana yang diberikan senilai Rp. 150.000, dan kemudian pada April 2020 sampai sekarang dana diberikan sejumlah Rp. 200.000. Satu-satunya pembelian yang dilakukan di e-warung pada tahun 2019 dengan menggunakan BPNT adalah beras dan/atau telur. Alat yang digunakan untuk mendistribusikan BPNT adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dalam hal bantuan sosial, KKS berfungsi sebagai dompet elektronik yang harus dibawa oleh KPM (PMK, 2019).

2.1.9 Acuan Indikator Penelitian

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada Peraturan Menteri Sosial No. 5/2021, yang mengatur tentang pelaksanaan program bantuan pangan. Dengan demikian, terdapat enam indikator pada pasal 2 dalam tujuan program BPNT poin c untuk mengukur kinerja program BPNT, yaitu ketepatan sasaran, waktu, jumlah, kualitas, dan administrasi.

2.2 Kajian Pustaka

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
1.	Diah Mukminatul Hasimi (2020)	Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Metode yang digunakan pada penelitian adalah metode kualitatif	Rendahnya tingkat pencapaian indikator 6T merupakan indikasi implementasi program yang tidak efektif, menurut data. Hanya tiga dari indikator tersebut- yaitu jumlah yang cukup, harga yang sesuai, dan kualitas yang sesuai- telah terpenuhi. Kesejahteraan masyarakat miskin belum membaik sebagai hasil dari inisiatif BPNT.
2.	Pebi Julianto (2020)	Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci	Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode <i>purposive sampling</i> dengan pendekatan kualitatif	Kesimpulan dari studi ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah telah digunakan secara terencana, terfokus, dan efisien. Masyarakat miskin tidak lagi menghadapi banyak kesulitan

No	Nama (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
				keuangan, dan hal ini dapat meningkatkan ketahanan pangan bagi kelompok masyarakat ini.
3.	Suci Laurentcia, Rahmadani Yusran (2021)	Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Nanggalo Kota Padang	Metode yang digunakan pada penelitian adalah metode deskriptif	Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa program BPNT belum berhasil mencapai tujuannya untuk menurunkan angka kemiskinan di Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Hal ini dikarenakan tujuan yang digariskan dalam kebijakan BPNT belum terpenuhi.
4.	Khotim Fadhil, Laila Rohmatun Nazila (2023)	Pengaruh Bantuan Sosial BPNT Dan PKH Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan	Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan metode analisis kuantitatif dengan analisis regresi berganda	Menurut temuan, PKH memiliki dampak yang baik dalam mengurangi kemiskinan, sedangkan BPNT memiliki dampak negatif. Pada saat yang sama, terdapat pengaruh gabungan yang cukup besar dari PKH dan BPNT

No	Nama (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
				dalam mengurangi kemiskinan.
5.	Lorena K. Sirega, H.V.R. Pattimukay, Jeanly Waisapy (2023)	Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon	Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif	Meskipun terdapat beberapa kendala, pelaksanaan program BPNT di Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, berjalan cukup baik.
6.	Chairil Anwar, Melizubaida a Mahmud, Abdulrahim Maruwae, Radia Hafi, Sudirman (2023)	Pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Gorontalo	Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode analisis regresi sederhana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak secara signifikan, program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) menurunkan tingkat kemiskinan. Nilai t hitung sebesar 0,3725, yang lebih tinggi dari nilai t tabel sebesar 0,2941, menjadi buktinya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat kemiskinan tidak akan banyak berubah, namun tingkat

No	Nama (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
				kemiskinan akan meningkat sebagai respons terhadap peningkatan bantuan pangan non-tunai (BPNT).

Sumber : Jurnal Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini mengacu pada penelitian Diah Mukminatul Hasimi, hal ini disebabkan karena memiliki kesamaan yaitu melihat capaian indikator 6T Program BPNT dan juga menggunakan pendekatan kualitatif. Akan tetapi, terdapat perbedaan objek penelitian serta dalam penelitian terdahulu melihat tingkat kesejahteraan masyarakat sedangkan dalam penelitian ini melihat bagaimana potret pelaksanaan program BPNT.

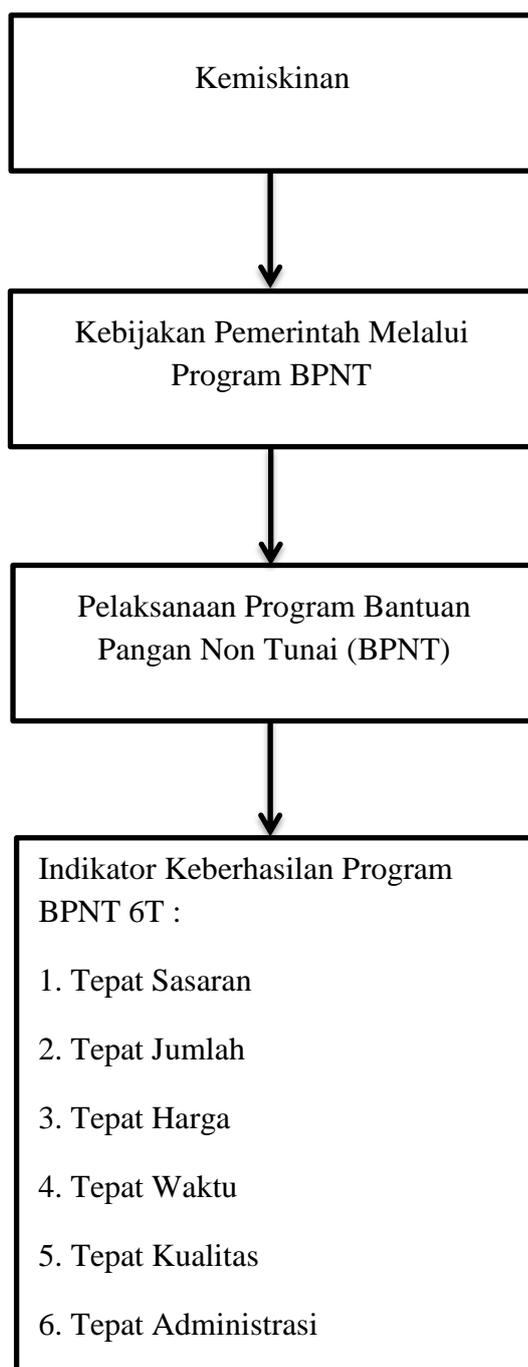
2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan ringkasan yang menunjukkan bagaimana variabel-variabel yang diteliti terkait satu sama lain. Kerangka pemikiran juga berfungsi sebagai peta jalan untuk pemecahan masalah dan pengembangan hipotesis penelitian, yang kemudian ditampilkan dalam bentuk diagram alir dengan penjelasan kualitatif. Pertanyaan penelitian, pemahaman sejumlah konsep, dan hubungan antar konsep atau variabel tersebut menjadi landasan pembuatan kerangka pikir.

Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Cycle of Poverty*) oleh Ragnar Nurkse (1953) mengungkapkan bahwa kemiskinan yang tidak mempunyai ujung dan pangkalnya dimana semua unsur yang mengakibatkan kemiskinan akan saling berhubungan (Nurkse, 1953). Sachs berpendapat bahwa mengembangkan sumber daya manusia adalah cara yang efektif untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan individu (Yulianto Kadji, 2004).

Kementerian Sosial Indonesia mengeluarkan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Tujuan dari BPNT yaitu mengentaskan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan pangan sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran KPM serta pemenuhan gizi seimbang. Indikator keberhasilan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu indikator 6T (Tepat sasaran, Tepat waktu, Tepat jumlah, Tepat harga, Tepat kualitas serta Tepat administrasi). Oleh karena itu, peneliti ingin melihat bagaimana pelaksanaan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Taman Asri.



III. METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian lapangan, yang didefinisikan sebagai studi sistematis dengan tujuan mengumpulkan data di lapangan, adalah pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti ini. Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, yaitu Desa Taman Asri, akan menjadi lokasi penelitian lapangan.

Penelitian yang peneliti lakukan bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengumpulkan fakta-fakta yang sudah ada sebelumnya dan hanya berkonsentrasi pada proses mengidentifikasi suatu permasalahan atau keadaan apa adanya, tanpa ada penambahan atau pengurangan, sehingga penelitian dapat dipandang secara keseluruhan. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang dipengaruhi oleh studi evaluasi program bantuan pangan non-tunai. Pendekatan ini mengharuskan peneliti memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian dan kemudian menggunakan berbagai teori para ahli yang relevan untuk menganalisis peristiwa-peristiwa tersebut. Menurut (Sugiyono, 2017), penelitian yang menggunakan teknik deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran yang benar, teratur, dan akurat mengenai suatu fenomena, peristiwa, gejala, atau kejadian. Dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Taman Asri.

3.2 Sumber Data

Sumber data merupakan lokasi darimana data berasal. Data didefinisikan sebagai informasi apa pun yang dapat diselidiki secara ilmiah dan digunakan untuk memandu pengambilan keputusan. Berikut klasifikasi dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Data Primer

Data primer berasal langsung dari sumber informasi asli di lokasi penelitian atau objek penelitian. Sumber data utama penelitian ini adalah informan, atau orang yang memberikan informasi. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT, kepala TKSK Purbolinggo, kepala desa Taman Asri menjadi informan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber selain sumber data primer. Sumber primer dan sekunder juga disertakan dalam pengumpulan data. Sumber yang terakhir menawarkan data yang dibutuhkan, sedangkan sumber yang pertama berisi data dari investigasi asli. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari peraturan tertulis, dokumen pemerintah, arsip, dan sumber data sekunder lainnya. Peneliti juga mengumpulkan data sekunder dari dinas sosial, website BPS, dan balai desa di wilayah tersebut (Iryana & Kawasati, 1990). Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa data penerima bantuan BPNT dari kepala TKSK Purbolinggo, website BPS, serta buku profil desa Taman Asri.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yakni tempat di mana data yang diperlukan untuk penelitian dikumpulkan. Istilah lokasi penelitian mengacu pada lokasi di mana penelitian akan dilakukan. Desa Taman Asri, di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, adalah lokasi penelitian ini. Peneliti mendatangi rumah-rumah (*door to door*) keluarga penerima manfaat saat membagi kuesioner. Waktu yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu kurang lebih 2 bulan lamanya, dari bulan Desember sampai dengan Januari 2024.

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2017), populasi adalah generalisasi dari suatu wilayah yang terdiri atas objek atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memiliki kualitas dan karakteristik tertentu untuk membantu dalam studi dan proses pengambilan Kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah KPM BPNT di Desa Taman

Asri yang telah menerima bantuan BPNT selama 5 tahun. Secara keseluruhan keluarga penerima manfaat BPNT yaitu sebanyak 359 KK.

Dalam penelitian ini, metode pemilihan sampel yang digunakan adalah pendekatan purposive sampling. Pendekatan ini digunakan sesuai dengan tujuan penelitian, yang memandu pemilihan informan. Informan dipilih berdasarkan keahlian dan kesesuaiannya dengan topik penelitian. Salah satu jenis metodologi pengambilan sampel yang bergantung pada penilaian peneliti untuk memilih unit studi disebut purposive sampling. Unit-unit ini dapat berupa individu, kelompok situasi, kejadian, atau informasi. Teknik ini sering kali disebut sebagai penilaian, seleksi, atau pengambilan sampel subjektif (Firmansyah & Dede, 2022)

Sugiyono, (2017) menegaskan bahwa sampel, yang menjadi dasar data penelitian, adalah bagian dari populasi, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi (359)

e : Tingkat kesalahan (*error tolerance*) (0,1)

Dengan menggunakan rumus Slovin, ukuran sampel untuk populasi sebanyak 359 orang dihitung. Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{359}{1 + 359 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{359}{1 + 3,59}$$

$$n = \frac{359}{4,59}$$

$n = 78,21$ maka dibulatkan menjadi 80

Dengan menggunakan populasi sebanyak 359 orang, rumus Slovin digunakan untuk menghitung jumlah sampel yang diperlukan untuk penelitian ini, sehingga memperoleh 80 sampel. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT dengan kriteria telah menerima bantuan BPNT setidaknya selama lima tahun.

3.5 Fokus Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni guna mengetahui lebih lanjut tentang penilaian program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Tujuan BPNT yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 menjadi indikator keberhasilan BPNT yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3.1 Fokus Penelitian

Berikut tabel fokus penelitian pada penelitian ini :

Indikator	Kriteria	Pernyataan	Skor Jawaban
1. Tepat Sasaran	Berdasarkan buku pedoman BPNT kriteria penerima bantuan merupakan keluarga dengan keadaan ekonomi dibawah 25%. Berdasarkan Permensos No 5 Tahun 2021 BPNT merupakan program bantuan guna memenuhi kebutuhan pangan.	1. Pendapatan saya kurang dari US\$2 atau Rp 31.000 per hari	5 : Sangat Setuju (SS)
		2. Program BPNT disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu	4 : Setuju (S)
		3. Saya menerima dana bantuan BPNT untuk membelikan kebutuhan pangan	3 : Kurang Setuju (KS)
			2 : Tidak Setuju (TS)
			1 : Sangat Tidak Setuju (STS)

Indikator	Kriteria	Pernyataan	Skor Jawaban
2. Tepat Jumlah	Berdasarkan buku pedoman BPNT yaitu KPM BPNT dapat menerima beras atau telur, dan disetiap e-warung menyediakan kebutuhan pangan yang sama.	4. Penerima BPNT dapat memperoleh beras dan telur setiap ada distribusi 5. Pengambilan sembako disetiap e-warung sama jumlahnya	5 : Sangat Setuju (SS) 4 : Setuju (S) 3 : Kurang Setuju (KS) 2 : Tidak Setuju (TS) 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)
3. Tepat Harga	Berdasarkan Permensos No 5 pasal 5 yaitu harga pangan berdasarkan harga pangan di wilayah setempat oeh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan daerah kabupaten/kota atau berdasarkan harga barang sekitar e-warung. Berdasarkan buku pedoman BPNT KPM menerima	6. Tidak terdapat perbedaan harga tebus beras, telur, dan bahan pokok lainnya di e-warung dengan warung lainnya 7. Penyaluran BPNT tidak terdapat potongan dengan alasan untuk didistribusikan ke masyarakat lain	5 : Sangat Setuju (SS) 4 : Setuju (S) 3 : Kurang Setuju (KS) 2 : Tidak Setuju (TS) 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)

Indikator	Kriteria	Pernyataan	Skor Jawaban
		bantuan tanpa dikenakan biaya atau potongan	
4. Tepat Waktu	Berdasarkan buku pedoman BPNT yaitu transfer dana BPNT ke rekening KPM BPNT dijadwalkan tanggal 25 setiap bulannya. Berdasarkan buku pedoman BPNT yaitu melakukan sosialisasimengenai mekanisme penyaluran bantuan BPNT	8.Saya selalu menerima pencairan BPNT setiap bulannya 9.Saya menerima pencairan BPNT paling lambat akhir bulan pencairan periode tersebut 10. Jadwal pendistribusian BPNT disosialisasikan dengan baik	5 : Sangat Setuju (SS) 4 : Setuju (S) 3 : Kurang Setuju (KS) 2 : Tidak Setuju (TS) 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)
5. Tepat Kualitas	Berdasarkan Permensos No 5 Tahun 2021 pasal 6 ayat 1 yaitu bahan pangan harus berkualitas serta layak untuk dikonsumsi oleh KPM. Berdasarkan Permensos No 5	11. Kualitas beras, telur, dan bahan pokok lainnya yang dijual di e-warung layak konsumsi 12. Bantuan BPNT mampu meringankan beban pengeluaran KPM	5 : Sangat Setuju (SS) 4 : Setuju (S) 3 : Kurang Setuju (KS) 2 : Tidak Setuju (TS) 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)

Indikator	Kriteria	Pernyataan	Skor Jawaban
		Tahun 2021 pasal 2 mengenai tujuan BPNT yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan kebutuhan pangan.	
6. Tepat Administrasi	Berdasarkan buku pedoman BPNT mengenai persyaratan administrasi seperti fotokopi KTP, KKS, dll.	13. Adanya kejelasan mengenai persyaratan administrasi 14. Ketepatan administrasi bermanfaat bagi penerima BPNT	5 : Sangat Setuju (SS) 4 : Setuju (S) 3 : Kurang Setuju (KS) 2 : Tidak Setuju (TS) 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)

Sumber : Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 (Lampiran 6)

Dari indikator yang tertera pada tabel 3.1 maka dapat disusun pernyataan yang sesuai dengan indikator yang ada, seperti pada variabel pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai dengan indikator yang pertama yaitu tepat sasaran untuk melihat apakah sudah sesuai ketepatan sasaran penerima bantuan pangan ini, selanjutnya pada indikator yang kedua yaitu tepat jumlah untuk melihat apakah bantuan pangan ini sudah sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan, lalu pada indikator ketiga yaitu tepat harga untuk melihat apakah terdapat perbedaan harga bahan pokok di e-warung dengan warung lainnya, selanjutnya pada indikator keempat tepat waktu yaitu untuk mengetahui apakah KPM BPNT

menerima bantuan sesuai jadwal pencairan, selanjutnya pada indikator kelima yaitu tepat kualitas untuk melihat apakah kualitas bahan pangan sudah sesuai ketepatan kualitas, dan pada indikator keenam yaitu tepat administrasi untuk melihat apakah adanya kejelasan dan ketepatan mengenai persyaratan administrasi.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh para ilmuwan untuk mendapatkan informasi dari sampel dan peserta penelitian. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data menjadi dasar untuk membangun instrumen penelitian.

Adapun teknik atau cara mengumpulkan data atau informasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.6.1 Observasi

Observasi adalah proses melihat dan mencatat gejala-gejala yang ditampilkan oleh subjek penelitian. Pengamatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi tidak langsung dilakukan dengan menggunakan instrumen tertentu misalnya dengan melihat melalui media, sedangkan observasi langsung mengharuskan peneliti melihat subjek penelitiannya dari dekat dan tepat pada lokasi terjadinya fenomena tersebut. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Taman Asri, Kecamatan Purbolinggo.

3.6.2 Wawancara Terstruktur

Wawancara adalah prosedur penelitian di mana pewawancara dan responden atau orang yang diwawancarai bertatap muka dan bertukar tanya jawab untuk mengumpulkan informasi dari orang yang diwawancarai dengan tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. Wawancara yang mengikuti standar wawancara dan materi pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya disebut sebagai wawancara terstruktur (Rahmadi, 2011).

Teknik kuesioner adalah metode pengumpulan data di mana responden menjawab serangkaian pertanyaan yang disusun secara metodis. Pernyataan tertulis atau

serangkaian pertanyaan diberikan kepada responden sebagai bagian dari kuesioner, yang merupakan alat untuk mengumpulkan data. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak mencatat jawaban responden atau mengajukan pertanyaan kepada mereka. Kuesioner terdiri dari seperangkat pertanyaan yang disusun secara sistematis, disertai dengan petunjuk pengisian dan bagian untuk mencatat identitas responden (nama, jenis kelamin, profesi, usia, dan karakteristik lainnya).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, wawancara terstruktur digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data. Wawancara tatap muka dilakukan oleh peneliti dengan responden, yang diberikan pertanyaan tertulis untuk dijawab. Peneliti tidak menanyakan responden secara langsung, melainkan menggunakan kuesioner yang memuat pertanyaan tersebut. Untuk mengetahui pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai Kabupaten Lampung Timur, Desa Taman Asri, Kabupaten Purbolinggo. Nama, usia, jenis kelamin, dan pekerjaan responden termasuk di antara rincian yang disertakan dalam kuesioner, bersama dengan pernyataan yang menyertakan indikator-indikator 6T.

Kuesioner langsung terbuka yang digunakan dalam penelitian ini hanya meminta responden untuk memilih salah satu jawaban yang tersedia untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Responden diberikan kuesioner secara langsung. Durasi singkat dari interval dalam alat pengukur dipastikan dengan menggunakan skala pengukuran, yang berfungsi sebagai referensi.

Dalam operasional variabel ini semua diukur oleh instrument pengukur dalam bentuk kuesioner yang memenuhi pernyataan-pernyataan tipe skala likert. Sikap, keyakinan, dan persepsi individu atau kelompok terhadap fenomena sosial dapat diukur dengan menggunakan skala Likert. Semua pilihan jawaban memiliki nilai numerik yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, untuk setiap pilihan jawaban diberi skor, maka responden harus menggambarkan, mendukung pernyataan (positif) atau tidak mendukung pernyataan (*negative*).

3.6.3 Dokumentasi

Gabungan antara analisis dokumen, wawancara, dan metode observasi digunakan dalam penelitian ini. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara mendokumentasikan data-data yang sudah ada. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan cara-cara yang digunakan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan di lapangan penelitian. Tujuan dari teknik pengolahan data adalah untuk mempermudah analisis data. Ada sejumlah teknik yang terlibat dalam pengolahan data, seperti editing, coding, dan tabulasi. Masing-masing tahap tersebut yaitu sebagai berikut :

3.7.1 Editing

Tahap editing merupakan tahap dimana peneliti mengedit atau melakukan pemeriksaan terhadap data yang sudah dikumpulkan. Pada tahap ini peneliti bisa memeriksa kelengkapan jawaban responden, kejelasan tulisan responden, kejelasan makna jawaban, konsistensi jawaban responden (yang tertulis dalam kuesioner), relevansi jawaban, dan sebagainya. Pada tahap ini juga, apabila hasil jawaban dari responden terdapat yang janggal atau tidak lengkap maka bisa dikembalikan atau ditanyakan kembali.

3.7.2 Coding

Untuk memudahkan pengolahan data, peneliti berupaya memperjelas jawaban responden pada tahap pengkodean proses pengolahan data dengan cara menandai jawaban dengan kode-kode tertentu berupa simbol angka atau simbol lainnya, atau dengan memberikan skor. dan simbol pada lembar jawaban kuesioner responden.

3.7.3 Tabulasi

Setelah pengeditan dan pengkodean, tabulasi adalah langkah selanjutnya dalam alur pengolahan data. Peneliti memasukkan data ke dalam tabel yang tersedia, seperti tabulasi silang dan tabel frekuensi, selama langkah tabulasi dalam pengolahan data. Proses tabulasi melibatkan pengorganisasian dan penghitungan data numerik.

3.8 Metode Analisis Data

3.8.1 Analisis Data

Analisis data adalah mencari dan menyusun informasi dari berbagai sumber, seperti survei, wawancara, dan catatan lapangan. Dalam proses ini, fakta dikategorikan, dibagi menjadi beberapa unit, pola diorganisasikan, informasi dipilih dan diurutkan untuk dianalisis, dan ditarik kesimpulan yang lebih mudah dipahami oleh khalayak umum maupun peneliti. Untuk mengidentifikasi indikator-indikator yang akan peneliti teliti, penelitian ini menggunakan tabel frekuensi.

3.9 Instrumen Penelitian

3.9.1 Uji Validitas

Pengujian validitas bertujuan untuk membuktikan bahwa informasi yang dikumpulkan oleh peneliti adalah benar jika dibandingkan dengan kejadian yang sebenarnya. Untuk memverifikasi keabsahan data yang dikumpulkan dari penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang digunakan sebagai instrumen pengumpulan data (Sugiyono, 2013). Sampel awal yang terdiri dari 80 responden survei KPM BPNT digunakan untuk uji validitas.

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X \cdot \sum Y)}{\sqrt{\{n \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} : Koefisien korelasi

n : Banyaknya sampel

$\sum XY$: Jumlah perkalian variabel x dan y

$\sum X$: Jumlah nilai variabel x

$\sum Y$: Jumlah nilai variabel y

$\sum X^2$: Jumlah pangkat dari nilai variabel x

$\sum Y^2$: Jumlah pangkat dari nilai variabel y

Dengan menggunakan program SPSS 25 for Windows, uji validitas yang telah ditunjukkan sebelumnya dilakukan sesuai dengan standar berikut:

1. Pernyataan dianggap valid jika nilai r hitung lebih tinggi dari nilai r tabel pada tabel.
2. Pernyataan dianggap tidak valid jika nilai r-hitung lebih kecil dari r-tabel.
3. Kolom item total correlation telah disesuaikan untuk menampilkan nilai r hitung.

3.9.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan salah satu teknik untuk menilai ketergantungan suatu kuesioner. Suatu kuesioner dianggap dapat dipercaya jika jawaban responden terhadap serangkaian pernyataan tertentu tidak berubah dari waktu ke waktu. Menurut Sugiyono (2014), sebuah instrumen dianggap kredibel jika menghasilkan temuan yang konsisten ketika digunakan pada objek yang sama oleh dua atau lebih peneliti.

Metode reliabilitas konsistensi internal dengan menggunakan koefisien reliabilitas *Cronbach's alpha* (α) digunakan dalam prosedur perhitungan reliabilitas penelitian ini. Hal ini sejalan dengan tujuan tes untuk mengevaluasi konsistensi item-item penelitian. Rumus berikut ini digunakan untuk mendapatkan nilai reliabilitas:

$$R = \alpha = \frac{n}{n-1} \left(\frac{S - \sum Si}{S} \right)$$

Keterangan :

R : Koefisien reliabilitas *Alpha Cronbach*

N : Jumlah item

S : Varians skor kepercayaan

Si : Varians masing-masing item

Skala *alpha Cronbach* (α), dengan rentang 0,00 hingga 1,00, berfungsi sebagai dasar untuk mengukur teknik *alpha Cronbach* (α). Jika skala dibagi menjadi lima

kelas dengan ukuran yang sama, pengukuran kestabilan alpha dapat digabungkan sebagai berikut:

1. Nilai alpha Cronbach 0,00 sampai dengan 0,20 berarti kurang *reliable*
2. Nilai alpha Cronbach 0,21 sampai dengan 0,40 berarti agak *reliable*
3. Nilai alpha Cronbach 0,41 sampai dengan 0,60 berarti cukup *reliable*
4. Nilai alpha Cronbach 0,61 sampai dengan 0,80 berarti *reliable*
5. Nilai alpha Cronbach 0,81 sampai dengan 1,00 berarti sangat *reliable*

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Potret Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Taman Asri maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai potret pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Taman Asri dengan melihat pelaksanaan indikator 6T yaitu, ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, ketepatan harga, ketepatan waktu, ketepatan kualitas, dan ketepatan administrasi. Berdasarkan persepsi KPM dari keseluruhan indikator, masih terdapat beberapa indikator yang kurang berjalan dengan baik, yaitu pada indikator tepat sasaran terdapat KPM BPNT dapat digolongkan keluarga mampu. Dan pada indikator tepat waktu terdapat KPM BPNT yang terkadang menerima bantuan tidak sesuai dengan jadwal pencairan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari potret pelaksanaan program BPNT di Desa Taman Asri, maka penulis mengemukakan beberapa saran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu :

Kurangnya ketepatan pada indikator tepat sasaran maka diharapkan adanya pendataan ulang ke lapangan dari pihak Desa agar program BPNT ini dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan indikator tepat sasaran, sehingga sesuai dengan kriteria penerima BPNT. Adanya kurangnya ketepatan pada indikator tepat waktu maka diharapkan pihak pemerintah lebih diperhitungkan kembali untuk pencairan dana BPNT agar

berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan karena masih terdapat beberapa KPM yang pada saat pencairan dana bantuan BPNT tidak muncul namanya ataupun ditunda sehingga tidak ada keterlambatan pendistribusian, sehingga tidak ada keterlambatan pendistribusian dan sesuai dengan indikator tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainistikmalia, N., Kharisma, B., & Budiono, B. (2022). Analisis Kemiskinan Multidimensi dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 22(1), 72–97. <https://doi.org/10.21002/jepi.2022.05>
- Akhmad Fatikhurrizqi, B. D. K. (2020). *Peran Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Timur Tahun 2020 (The Role of Social Assistance in Alleviating Extreme Poverty in East Java in 2020)*. 2020, 1027–1036.
- Annur, R. A. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kecamatan Jekulo Dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4), 409–426.
- Asy'ariati, F. A., Wahyudi, H., Murwiati, A., Nirmala, T., & Yulihar Taher, A. R. (2022). Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung. *E-Journal Field of Economics, Business and Entrepreneurship*, 1(1), 11–21. <https://doi.org/10.23960/efebe.v1i1.23>
- Firdausi, D. S., & Hertati, D. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 1126. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2323>
- Firmansyah, D., & Dede. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85–114. <https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>
- Hidayat Srihadi Hidayat, Afifuddin, H. (2021). Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo). *Inovasi Penelitian*, 2(5), 1647–1654.
- Iryana, & Kawasati, R. (1990). *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. 21(58), 99–104. <https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom> 1989
- Julianto, P. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Sitingau Laut Kabupaten Kerinci. *Qawwam: The Leader's Writing*, 1(1), 38–43. <https://doi.org/10.32939/qawwam.v1i1.77>

- Kominfo. (2011). Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II. *Kemkominfo*, 18.
- Laurentcia, S., & Yusran, R. (2021). Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Nanggalo Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 4(1), 7–17. <https://doi.org/10.24036/jce.v4i1.433>
- Muhammad Nurjihadi, A. H. D. (2016). *Lingkaran Setan Kemiskinan Dalam Masyarakat Pedesaan Studi Kasus Petani Tembakau Di Kawasan Pedesaan Pulau Lombok*.
- Nurhasan, R., Kusrin, & Purnamasari, H. (2021). Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Program E-Waroeng Kepada Masyarakat Desa Tanjung Baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(8), 274–283. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5763945>
- Nurkse, R. (1953). *Problems of Capital Formation In Underdeveloped Countries*.
- Perdana, Y. K., Akbar, D., & Pratama, R. A. (2023). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kota Tanjungpinang melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebagai Upaya Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). 1(3).
- Perpres RI No 166 Tahun 2014. (2014). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*. 184, 1–27.
- PMK. (2019). Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019. In *Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019*.
- Rachman, B., Agustian, A., & Wahyudi, N. (2018). Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). *Analisis Kebijakan Pertanian*, 16(1), 1. <https://doi.org/10.21082/akp.v16n1.2018.1-18>
- Rahma, F. E., Yulihar, R. A., Ciptawaty, U., & Suparta, I. W. (2023). Ketahanan Pangan di Indonesia Tahun 2014-2021. *BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(2), 376–381. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet>
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar Metodologi Penelitian.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar%20Metodologi%20Penelitian.pdf)
- Ramadhan, E. K. (2023). *Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Labuhan Tangga Kecil Village , Bangko District , Rokan Hilir Regency , st. 10*.
- Ratih, A., Gunarto, T., & Murwiati, A. (2023). Is Multidimensional Poverty Different from Monetary Poverty in Lampung Province? In *International*

Conference of ... (Issue 2010). Atlantis Press SARL.
<https://doi.org/10.2991/978-2-38476-064-0>

- Renwarin, B. (2016). Kemiskinan Dan Intervensi, Perspektif Jeffrey D. Sachs. *Limn*, 2005. <http://jurnal.stft-fajartimur.ac.id/index.php/lim/article/view/20>
- Rupiarsieh, & Musta'ana. (2023). *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non- Tunai (Bpnt) dengan Metode E-Warung di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 (Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro)*. 2(2).
- Stella Kakisina, C. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Jayawijaya. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 43–52. <https://doi.org/10.55049/jeb.v7i2.30>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Triani, Y., Ekonomi, F., Islam, B., & Sumantri, R. (2020). Analisis Pengentasan Kemiskinan Di Kota Palembang Maya Panorama. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 2579–6453.
- Yoserizal. (2015). Kemiskinan dan Permasalahannya. In *Indeks Kemiskinan Manusia* (p. 17).
- Yulianto Kadji. (2004). *Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya*. 1–3.
- Yuliawan, D., Hakim, D. B., Juanda, B., & Fauzi, A. (2022). Integrated rural socio-economic vulnerability analysis in Lampung Province. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 10(3), 175–188. <https://doi.org/10.22437/ppd.v10i3.17591>
- Yunus, E. Y. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. *Reformasi*, 9(2), 138. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1454>